

Dinamika Politik Lokal Perspektif Kewilayahan Dalam Menciptakan Pembangunan Masyarakat Desa “*Rural Politics*”

Very Wahyudi¹

¹UIN Mataram: verywahyudi@uinmataram.ac.id

Abstract

Rural areas are defined as rural communities living at the local level or what is known as the village. It is very important to observe and observe the dynamics of political life at the village level, because building a country that is independent, advanced and maintains national integrity starts from the lowest level, namely the village or rural community. So the awareness of the importance of developing rural communities continues into the current government, this is indicated by the Central Government's program by providing fresh funds every year to villages throughout Indonesia. Of course, this is an indication of the importance of building communities at the village level so that they are self-sufficient and have higher productivity and will further improve people's welfare. A village or rural environment (rural area) is a community that is always associated with simplicity, backwardness, traditionalism, subsistence and isolation.

Keywords: *Local Politics, Rural Politics, Village Development.*

Abstrak:

Rural area didefinisikan sebagai masyarakat pedesaan yang tinggal pada level lokal atau yang dikenal dengan istilah desa. Dinamika kehidupan politik pada level desa menjadi sangat penting untuk dilihat dan dicermati, karena membangun sebuah negara yang mandiri, maju dan menjaga integritas nasional dimulai dari level paling rendah yaitu desa atau masyarakat pedesaan. Maka kesadaran akan pentingnya membangun masyarakat pedesaan berlanjut hingga pemerintahan saat ini, hal ini ditandai dengan program yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan dana segar setiap tahunnya kepada desa diseluruh Indonesia. tentunya ini merupakan sebuah indikasi pentingnya membangun masyarakat pada level desa supaya mandiri dan produktifitas semakin tinggi dan akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa atau lingkungan pedesaan (*rural area*) merupakan sebuah komunitas yang selalu dikaitkan dengan kebersahajaan (*simplicity*), keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi dan keterisolasian.

Kata Kunci: Politik lokal, Rural Politics, Pembangunan Desa.

1. Pendahuluan

Secara garis besar *rural area* dapat diartikan sebagai masyarakat pedesaan atau masyarakat yang tinggal pada level lokal yaitu desa. Sebagai “unit” terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan memiliki sejarah yang cukup panjang dalam perjalanan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya dinamika kehidupan politik pada level desa menjadi sangat penting untuk dilihat dan dicermati, karena membangun sebuah negara yang mandiri, maju dan menjaga integritas nasional dimulai dari level paling rendah yaitu desa atau masyarakat pedesaan. Hal ini senada dengan apa yang dilakukan oleh para

founding fathers negeri ini dalam rangka membangun kemerdekaan Republik Indonesia maupun pada masa orde baru, dimana munculnya kesadaran betapa penting dan perlunya pelaksanaan pembangunan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan produktifitas masyarakat yang tentunya berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut hal ini akan berdampak secara langsung terhadap kemandirian dan kemajuan negara Republik Indonesia(Surdjadi, A. 1997).

Kesadaran pentingnya membangun masyarakat pedesaan berlanjut hingga pemerintahan saat ini, hal ini ditandai dengan program yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan dana segar stiap tahunnya kepada desa diseluruh Indonesia, tentunya ini merupakan sebuah indikasi pentingnya membangun masyarakat pada level desa supaya mandiri dan produktifitas semakin tinggi dan akan semakin meningkatkan kesejateraan masyarakat. Desa atau lingkungan pedesaan (*rural area*) merupakan sebuah komunitas yang selalu dikaitkan dengan kebersahajaan (*simplicity*), keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi dan keterisolasian (Rahardj, 1999). Masyarakat pedesaan tersebut ditandai dengan sebuah pemilikan ikatan batin yang kuat antar warga desa yaitu perasaan setiap warga anggota masyarakat yang sangat kuat pada hakekatnya. Kemudian masyarakat pedesaan atau rural area biasanya tidak terbuka atau tidak mengizinkan adanya suatu perubahan, hal tersebut didasarkan kepada adanya kekhawatiran hilangnya budaya dan identitas dalam masyarakat pedesaan (Prsadj, 1980). Dengan demikian tulisan ini akan berbicara tentang bagaimana kehidupan atau karakter masyarakat pedesaan yang dapat dilihat sangat homogen dan bersifat kolektif baik dari perseptif politik, ekonomi, kultural maupun bentuk demografinya yang akan dijelaskan secara sederhana.

Landasan Teori;

Secara etimologi kata “desa berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “*deca*” yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Berikut ini ada beberapa pengertian desa menurut para ahli; Pertama, menurut R. Bintaro dalam buku Hanif Nurcholis (Hanif, 2011), “desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik

dengan daerah lain". Kedua, menurut Wasistino dan Tahir dalam Rauf (Wasistino & Tahir, 2006), "desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya". Ketiga menurut Indra Bastin (Bastin, 2015), "desa atau udik menurut definisi universal merupakan sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan. Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan desa yang satu dengan desa yang lainnya".

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Denzin dan Lincoln dalam Moleong (Moleong, 2005) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Krik dan Miller dalam Moleong (Moleong, 2017) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

3. Hasil dan Diskusi

1. Sejarah Lahirnya Masyarakat Pedesaan (*Rural Area*)

Lahirnya istilah desa di Indonesia merupakan pengaruh dari masyarakat Hindu, jika dilihat adanya persamaan-persamaan dengan keadaan di India pada saat itu. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa bahwa desa seperti yang ada di Jawa, Madura, Bali adalah ciptaan orang Indonesia asli dan bukan buntut atas pengaruh orang Hindu. Hal ini disebabkan karena dahulu Indonesia telah banyak komunitas atau suku yang berkumpul dan pada akhirnya menetap sehingga membentuk sebuah perkampungan atau tempat tinggal yang tetap atau bisa dikatakan seperti sebuah desa. Dengan pertanian sebagai unsur yang penting berarti manusia sudah mulai bertempat tinggal yang tetap, mempunyai tanah untuk mengusahakan pertanian bahan makanan. Kemudian dengan mengerjakan sawah dan ladang orang akan dapat memungut hasil yang lebih banyak dari tempat dimana mereka tinggal. Dengan cara hidup yang menetap demikianlah kemudian timbul masyarakat desa, yang paling penting pula bahwa suburnya

tanah dan luas serta longgarnya daerah yang dapat dikerjakan dapat dikerjakan akan berpengaruh atas besarnya persekutuan manusia yang menetap di sana. Jadi tanah adalah faktor utama yang paling menentukan tentang besarnya pergaulan hidup desa.

Menurut Koentjaraningrat dalam (I Nyoman Beratha 1982 : 11) memberikan spesifikasi tentang masyarakat pedesaan di Indonesia antara lain :

- a. Prinsip hubungan kekerabatan (geneologis)
- b. Prinsip hubungan tinggal dekat (territorial)
- c. Prinsip tujuan khusus, seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor ekologis
- d. Prinsip hubungan yang tidak timbul dari dalam masyarakat pedesaan sendiri tetapi datang dari atas seperti aturan, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kerajaan-kerajaan pribumi, atau oleh pemerintah jajahan yang pernah berkuasa diberbagai tempat di Indonesia.

Sehingga dengan prinsip-prinsip tersebut akhirnya terbentuklah masyarakat pedesaan, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan sektor pertanian sebagai lahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat pedesaan tersebut. Dengan aktifitas sosial yang tumbuh dalam lingkungan kecil tersebut membuat prinsip-prinsip hubungan kekerabatan dan tempat tinggal yang dekat kemudian hubungan sosial ini semakin berkembang dalam aktifitas yang lebih luas seperti dalam bidang pertanian yang menjadi mata percaharian sehingga pada akhirnya terbentuklah masyarakat pedesaan.

2. Karakter atau ciri-ciri masyarakat pedesaan (Rural Area)

Ciri desa dalam pandangan Gunawan-Aris (2018) yaitu memiliki hubungan erat dengan alamnya kemudian memiliki unit kerja dengan penduduk yang kecil dan sebagian esar penduduknya bermata pencarian pertanian dan perkebunan, selanjutnya ikatan kekeluargaan di desa banyak ditentukan oleh adat, moral dan hukum informal. Maka secara spesifik ciri masyarakat pedesaan dapat dijabarkan sebagai berikut;

- a. Kehidupan masyarakat desa yang cenderung religius
- b. Kehidupan masyarakat yang cenderung homogen
- c. Kehidupan masyarakat yang cenderung berorientasi kepada tradisi dan status
- d. Kesatuan dan keutuhan kultural
- e. Masih percaya dan melakukan ritual dan nilai-nilai sakral

- f. Sangat mengekedepankan sebuah kebersamaan atau kolektivitas
- g. Prilaku masyarakat yang dilandasi dengan konsep kekeluargaan dan kebersamaan
- h. Pekerjaan masyarakat pedesaan yang mayoritas berada pada sektor agraria atau pertanian.

3. Demografi dan Geografis Masyarakat Pedesaan (*Rural Area*)

Jumlah penduduk pada suatu desa tidak sama dengan desa yang lain, hal ini tergantung atas luas wilayah yang dimiliki oleh desa tersebut, tetapi secara garis besar jumlah penduduk masyarakat pada sebuah desa di Indonesia berkisar kurang dari 2.500 jiwa. Pada masyarakat pedesaan cenderung kehidupan yang sederhana dan tidak padat, hal ini dapat dilihat dari jarak antar satu rumah dengan rumah tetangga yang lain berjarak karena lahan yang masih banyak sehingga terkadang disuatu desa tertentu setiap rumah memiliki taman atau kebun pribadi yang cukup luas untuk menanam kebutuhan pokok rumah tangga seperti cabe, kunyit, serai dan sebagainya sehingga tidak membeli untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga.

Kemudian keadaan alam, iklim dan kekayaan alam menjadi faktor utama masyarakat pedesaan dalam menjalani kehidupan, karena hampir seluruh masyarakat pedesaan di Indonesia mencari nafkah melalui memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dengan pertanian atau agraria sebagai ladang penghasilan masyarakat pedesaan tersebut, meskipun ada pekerjaan selain sektor agraria hal tersebut merupakan sebuah pekerjaan sampingan atau tambahan. Semakin hari jumlah penduduk desa semakin berkurang hal ini disebabkan oleh terjadinya urbanisasi atau migrasi kekota, karena masyarakat pedesaan menganggap gemerlap kehidupan kota dapat memberikan perubahan nasib dan kehidupan masyarakat tersebut.

4. Perspektif Politik Masyarakat Pedesaan (*Rural Politik*)

Masyarakat pedesaan dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung secara demokratis oleh penduduk desa tersebut, tentunya kepala desa memiliki kewenangan dan kekuasaan terbatas sesuai dengan peraturan yang ada. Meskipun tidak semua desa di Indonesia yang dipilih langsung oleh masyarakat desa tersebut, ada beberapa desa dengan memakai sistem adat atau yang biasa dikenal dengan desa adat sehingga yang menjadi kepala desa secara langsung diduduki oleh tokoh adat pada desa tersebut sehingga masyarakat secara

langsung menunjuk tokoh adat tersebut menjadi pemimpin desa tersebut dan ini berlangsung secara terus menerus. Seiring berjalannya waktu posisi kepala desa menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan, hal tersebut didasarkan kepada semakin diperhatikannya desa oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan bantuan dana segar kepada desa untuk bisa membangun desa tersebut dengan harapan produktivitas masyarakat semakin tinggi, tentunya ini berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian posisi kepala desa saat ini menjadi "rebutan" karena anggaran yang ada begitu banyak yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang dimulai pada level paling rendah yaitu masyarakat pedesaan.

5. Perspektif Ekonomi Masyarakat Pedesaan (*Rural Area*)

Desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan memiliki peran ekonomi yang penting dalam upaya membangun tata kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan cara menyuplai barang-barang tertentu atau hasil pertanian dan bahan pokok untuk rumah tangga seperti beras, cabe, bawang, sayuran, buah-buahan dan sebagainya yang dikirimkan ke kota-kota besar untuk memenuhi kebutuhan kehidupan diperkotaan di Indonesia, karena desa dengan lahan pertanian yang masih sangat luas memungkinkan untuk memenuhi setiap kebutuhan disektor pertanian atau agraria tersebut. Sehingga masyarakat pedesaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keberlanjutan kehidupan masyarakat, terutama untuk kota-kota besar yang tidak memiliki lahan pertanian sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk rumah tangga maka harus membeli barang pangan yang didatangkan dari desa-desa yang memiliki sektor pertanian yang baik dan luas.

6. Perspektif kultural Masyarakat Pedesaan

Masyarakat desa yang cenderung homogen, dengan karakter masyarakat yang hampir sama disatu desa dan hampir pasti setiap desa memiliki etnis dan identitas masing-masing sehingga hal ini membuat setiap etnis tersebut dapat dijadikan sebagai budaya Indonesia yang harus selalu dilestarikan dan dijaga oleh setiap masyarakat. Sehingga dengan hal tersebut menjadikan Indonesia yang heterogen, selalu menjaga identitas atau etnisitas yang berbeda disetiap seluruh desa yang ada di Indonesia.

Dengan demikian dapat dilihat bahwasanya karakter kehidupan masyarakat pedesaan sangat homogen dan menjunjung tinggi sebuah kebersamaan atau kolektifitas, hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan diatas, dimana hampir seluruh masyarakat pedesaan di Indonesia masih memegang kultur dan budaya nenek moyangnya dan cenderung tidak terbuka dengan sebuah perubahan dan dari segi mata pencaharian hampir semua masyarakat pedesaan bergerak pada sektor pertanian atau agraria, meskipun ada pekerjaan selain sektor pertanian itu hanya dianggap sebagai pekerjaan tambahan atau sampingan. Maka sangat menarik untuk dilihat dan dibahas berikutnya dinamika politik masyarakat pedesaan atau rural politics apalagi dengan adanya aturan baru yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam mengatur kehidupan masyarakat pedesaan saat ini.

7. Pengaturan Politik Lokal di Tingkat Desa

Hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa angin segar bagi masyarakat desa di Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut, desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang berperan dalam merencanakan pembangunan dan mengelola keuangan desa. Dengan adanya UU Desa kedudukan dan kewenangan desa menjadi lebih jelas. Desa tidak lagi menjadi subsistem dari pemerintahan kabupaten-kota, tetapi sebagai subsistem NKRI. UU Desa ini memberi ruang dan akses pada desa untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki, tidak tergantung pada lembaga supradesa atau kabupaten. UU Desa tidak hanya akan membangun kemandirian desa, tetapi juga dapat memperkuat partisipasi warga dalam kebijakan dan penyelenggaraan desa. Selain itu dapat memperkuat pilar demokrasi desa, memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik, serta merevitalisasi modal sosial desa untuk pemberdayaan lokal. Sementara pengambilan keputusan yang menyangkut urusan strategis seperti investasi, pengelolaan sumberdaya alam, kerja sama antardesa, dan segala hal menyangkut hajat hidup warga harus melibatkan warga dalam forum musyawarah desa. "Pengembangan ekonomi desa perlu menitikberatkan pada produktivitas, pembukaan lapangan kerja, dan kesejahteraan warga.

8. Persoalan Aktual dan Implikasi dalam *Rural Area* Antara Lain :

a. Pendidikan

Persoalan klasik yang sering terjadi di setiap masyarakat pedesaan adalah masalah pendidikan, hal ini hampir terjadi diseluruh desa di Indonesia. Ketiadaan infrastruktur sekolah membuat banyak anak-anak di desa tidak bisa melanjutkan pendidikannya, kemudian sulitnya akses menuju tempat sekolah juga menjadi pemandangan yang sering dilihat di berbagai desa di negeri ini dan cenderung persoalan ini tidak terselesaikan dengan baik. Masalah lain tentang pendidikan adalah keterbatasan tenaga pengajar atau guru membuat anak-anak didesa tertentu di Indonesia tidak dapat menikmati hak-hak dasar yang seharusnya dijamin dan harus dipenuhi oleh pemerintah yang diamanahkan lewat UUD 1945. Sehingga tidak dapat dipungkiri masih banyak desa dipelosok Indonesia yang masyarakatnya masih terdapat buta huruf, hal ini merupakan akibat dari ketidakmampuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sampai pada level desa dan perangkanya tidak mampu menyediakan pendidikan untuk masyarakat pedesaan khususnya anak-anak pada desa yang terdapat dipelosok negeri ini yang jauh dari sorot pemerintah maupun media massa. Meskipun tidak dapat dipungkiri telah banyak desa di Indonesia yang telah dapat jaminan pendidikan yang layak tetapi masih banyak juga desa terutama dipelosok yang belum dapat pendidikan yang baik.

b. Kesehatan

Kebutuhan kesehatan menjadi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hal akan membuat produktifitas masyarakat pedesaan semakin meningkat dan tentunya kesehatan menjadi prioritas utama Pemerintah kehidupan masyarakat pedesaan tidak terganggu. Tetapi kebutuhan kesehatan tidak semua masyarakat pedesaan dapat mengaksesnya dengan mudah, hal ini didasarkan kepada masih banyaknya desa-desa di Indonesia yang masih belum mempunyai puskesmas atau puskesmas pembantu yang biasanya berada pada sebuah desa sehingga tidak mengherankan angka kematian pada masyarakat pedesaan khususnya desa terpencil semakin tinggi, karena memerlukan perjalanan yang jauh hanya untuk berobat maka tidak jarang dalam perjalanan nyawa masyarakat tidak tertolong. Meskipun pemerintah telah banyak mengeluarkan program dalam bidang kesehatan seperti BPJS dan sebagainya tetapi tidak semua masyarakat pedesaan dapat mengakses hal tersebut sehingga

ada akhirnya jaminan kesehatan menjadi barang yang “langka” bagi sebagian masyarakat pedesaan khususnya desa terpencil di Indonesia.

c. Menolak Perubahan

Persoalan berikutnya yang selalu terjadi diberbagai desa-desa di Indonesia khususnya desa-desa terpencil di Indonesia adalah menolak sebuah perubahan yang masuk baik dalam bentuk budaya maupun teknologi yang masuk sehingga hal ini menyebabkan sulitnya desa tersebut untuk berkembang atau pun maju. sehingga hal tersebut menyulitkan program-program yang dibuat oleh pemerintah sulit untuk diterapkan pada masyarakat pedesaan tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat desa tersebut selalu keterbelakangan dan terisolasi dari kehidupan diluar. Masyarakat pedesaan tersebut beralasan tidak bolehnya masuk budaya dan teknologi dari luar akan menyebabkan nilai-nilai yang turun temurun dari leluhur mereka akan terkikis dan hilang sehingga masyarakat pedesaan tersebut berusaha semaksimal mungkin menolak sebuah perubahan baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat luar.

d. Terbatasnya SDM

SDM menjadi elemen yang sangat penting dalam membangun sebuah desa, karena apabila SDM tidak mempunyai dalam masyarakat di pedesaan maka sangat sulit desa tersebut untuk maju. Misalnya dalam mencari kepala desa dibutuhkan seorang tokoh masyarakat yang memiliki SDM yang baik supaya persoalan-persoalan yang terjadi pada kehidupan masyarakat pedesaan dapat terselesaikan dengan cepat. Maka dibutuhkan seseorang yang tidak hanya “dituakan” dalam masyarakat desa tetapi capable dan mempunyai kompetensi yang baik dalam kepemimpinan, apalagi saat ini ada anggaran yang cukup besar yang diberikan kepada desa untuk membangun desa-desa di Indonesia. sehingga apabila pemimpin tersebut tidak mempunyai karakter yang baik dan handal bisa saja anggaran tersebut tidak bisa digunakan dengan baik oleh kepala desa tersebut.

4. Simpulan

Rural area atau masyarakat pedesaan sebagai sebuah komunitas yang selalu berhubungan dengan erat dengan keterbelakangan, hal-hal yang bersifat

tradisional dan selalu pada kondisi terisolasi. Kemudian masyarakat pedesaan atau rural area tersebut biasanya tidak terbuka atau tidak mengizinkan adanya suatu perubahan, hal tersebut didasarkan kepada adanya kekhawatiran hilangnya budaya dan identitas dalam masyarakat pedesaan. Persoalan tersebut yang menjadikan masyarakat pedesaan selalau pada posisi ketertinggalan, karena berada pada posisi atau level pemerintahan yang paling rendah membuat desa selalu tidak diperhatikan baik oleh Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Sehingga hal ini menyebabkan banyak desa di Indonesia yang mengalami kemunduran dan kemiskinan seperti tidaknya adanya infrastruktur pendidikan maupun kesehatan yang membuat pada akhirnya banyak masyarakat pedesaan tidak bisa menikmati hak-hak dasar sebagai warga negara padahal semua itu harusnya dijamin oleh pemerintah yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Kompleksnya masalah yang terdapat dalam masyarakat pedesaan membuat dinamika politik masyarakat desa sangat menarik untuk dilihat, karena seiring perkembangan zaman desa tidak lagi dianggap sebagai daerah yang terdapat pada level rendah dan cenderung “terabaikan” tetapi mendapat perhatian yang besar dari Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan kebijakan dana segar yang disalurkan untuk seluruh desa di Indonesia. Tentunya ini menjadi angin segar bagi setiap desa di Indonesia untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat di pedesaan tersebut. Sehingga kedepannya dengan kearifan lokal dan sistem otonomi desa ditambah dengan dana segar yang berikan oleh pemerintah tersebut yang dimiliki oleh setiap desa diharapkan mampu untuk memajukan desa-desa di Indonesia.

Referensi:

- Bastin, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*, Jakarta; Erlangga.
- Bratha, I Nyoman, 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakara; Ghalia Indonesia.
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta; Erlangga.
- Lexy, Moleong, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Remaja Rodakarya.
- Moleong, Lexy J, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.

Prasadja, Buddy. 1980. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Cirebon Jawa Barat; Raja Wali Press.

Prayitno, Gunawan, 2018. *Membangun Desa: merencanakan desa dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan*. Malang; UB Press.

Rahardj. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press

Surdjadi, A. 1997. *Pembangunan Masyarakat Desa*, andung. Alumni Press.

Wasistino & Tahir, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung; CV. Fokus Media.